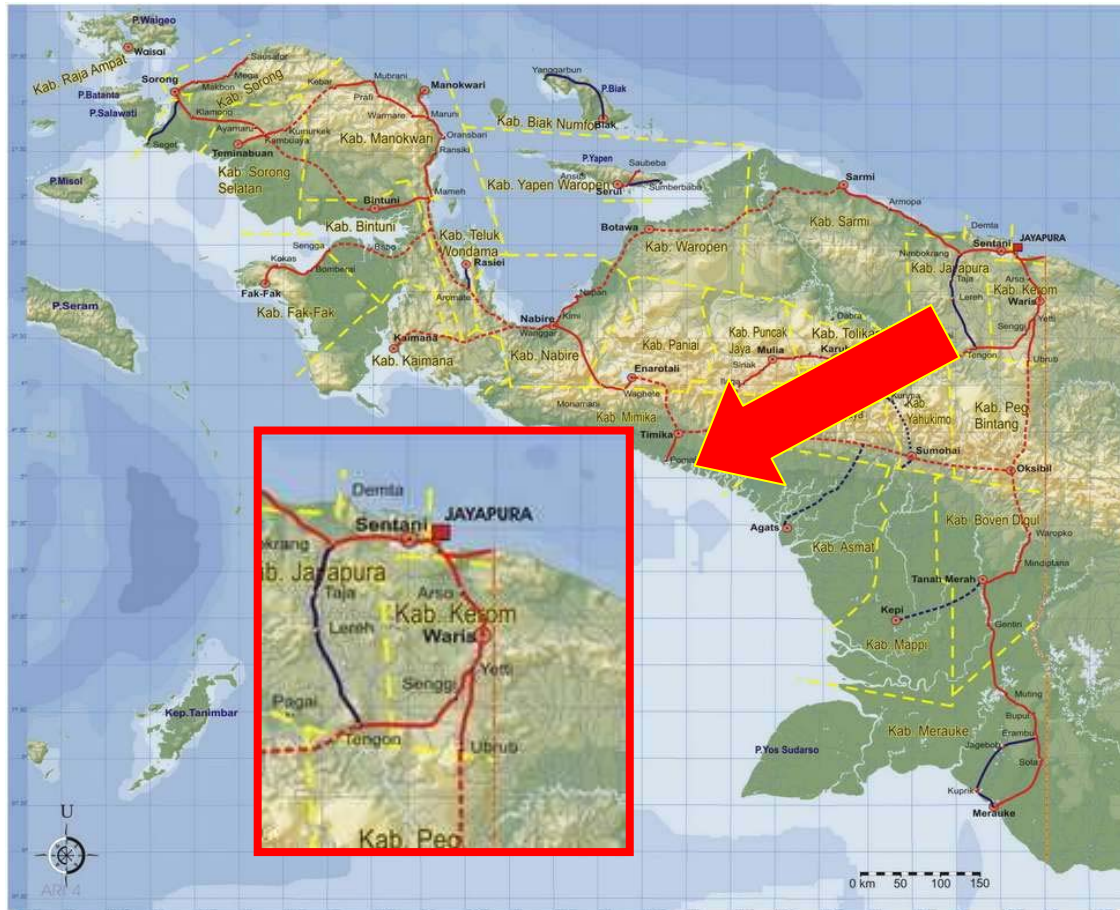


LAPORAN SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN KEEROM PROVINSI PAPUA



PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI PAPUA
WILAYAH KEEROM
ARSO
Oktober 2007

**PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI PAPUA
WILAYAH KEEROM**
Sekretariat: Pastoran Katolik St. Willibrordus, Arso Kota

Kepada Yang Terhormat
Bupati Kabupaten Keerom
Bpk. Celsius Watae
Di Arso

Perihal: Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Keerom

Dengan hormat,

Seperti bapak ketahui, situasi masyarakat di wilayah Kabupaten Keerom selama beberapa bulan terakhir ini mengalami situasi yang meresahkan dan bahkan membuat masyarakat takut. Situasi ini disebabkan oleh berbagai tindakan intimidasi oleh oknum-oknum anggota TNI, khususnya Satuan Kopassus, yang bertugas di wilayah kita ini.

Situasi ini meluap tak tertahankan lagi dan berubah menjadi kemarahan massa saat terjadi pemukulan kepada Kepala Distrik Arso, Bpk. Charles Tafor, oleh Sertu Dedy pada tgl. 18 Oktober 2007 yang baru lalu.

Dari data yang kami kumpulkan dan juga pengalaman dalam mendampingi Umat Tuhan di berbagai tempat di wilayah Keerom, kami yakin bahwa keadaan ini sudah terpola sedemikian lama. Karena itu pada kesempatan ini **Persekutuan Gereja-gereja Papua (PGGP) Wilayah Keerom** menyerahkan “**LAPORAN SITUASI HAK ASASI MANUSIA DI WILAYAH KEEROM, PROVINSI PAPUA**” agar ada langkah-langkah penyelesaian yang lebih menyeluruh mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Keerom ini. Dalam laporan ini kami merekomendasikan hal-hal berikut ini:

1. Mengingat keadaan traumatis ini telah berlangsung selama lebih kurang 20 tahun terakhir, tidaklah cukup Panglima TNI mengganti dan menindak tegas oknum-oknum TNI, khususnya Satuan Kopassus, yang meresahkan

masyarakat. Diperlukan **pembaruan kebijakan pertahanan** yang lebih menyeluruh yang selaras dengan Undang-Undang No. 3/2002 tentang **Pertahanan Negara** dan Undang-Undang No. 34/2004 tentang **Tentara Nasional Indonesia**.

2. Sehubungan dengan pembaruan kebijakan tersebut, pos-pos militer harus ditempatkan di luar pemukiman penduduk guna menghindari segala tindakan eksekutif dari pihak anggota-anggota TNI kepada masyarakat setempat seperti yang telah terjadi selama ini.
3. Dalam rangka pembaruan kebijakan pertahanan, anggota-anggota TNI yang hendak ditugaskan di Keerom khususnya dan Papua umumnya perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang adat istiadat dan filsafat hidup orang Papua.
4. Karena itu sebelum kebijakan baru dirumuskan, penempatan Satuan Kopassus di Wilayah Kabupaten Keerom **perlu segera ditangguhkan**.
5. Namun demikian, dalam **jangka pendek** Panglima TNI perlu segera mengganti dan menindak tegas oknum-oknum TNI yang melakukan berbagai tindak intimidasi dan teror yang meresahkan masyarakat agar kepercayaan masyarakat dan kewibawaan TNI dipulihkan kembali.
6. Panglima TNI perlu segera memberikan jaminan keamanan kepada semua petugas pemerintah dan petugas Gereja di wilayah Keerom sehingga tidak mengalami tindakan intimidasi dan teror dari oknum-oknum TNI.
7. Panglima TNI perlu segera memberikan jaminan keamanan kepada seluruh warga masyarakat dan **khususnya kaum perempuan, para guru dan semua orang yang namanya disebut dalam laporan ini** agar dapat kembali hidup normal dan bertugas di wilayah tersebut.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dan Provinsi Papua segera melakukan upaya-upaya rehabilitasi keadaan dan perlindungan hak asasi masyarakat di Distrik Waris dan distrik lainnya di sekitar perbatasan RI-PNG.
9. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan segera mengirimkan tim penyelidik guna mengungkapkan secara lebih teliti dan mendalam keadaan hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Kami berharap bahwa instansi-instansi yang berwenang akan menindaklanjuti laporan ini demi perlindungan hak-hak asasi masyarakat Keerom yang sama-sama kita layani.

Semoga Tuhan Sang Maha Adil memberkati langkah kita bersama!

Arso, 26 Oktober 2007

Persekutuan Gereja-Gereja Papua
Wilayah Keerom

Pastor Willem Sinawil pr
Ketua Umum

Pdt. Eddy Togodly
Ketua I

Pdt. Pubelius Manuaron S.Si
Ketua II

Pdt. Edi Santosa
Wakil PGGP Skanto

Bpk. Daniel Pasanda
Sekum PGGP Wilayah Keerom

Tembusan:

1. Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Papua
2. Panglima TNI
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

4. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
5. Gubernur Papua
6. Pangdam XVII/ Trikora
7. Kapolda Papua
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua
9. Ketua Majelis Rakyat Papua
10. Mitra Kerja PGGP Wilayah Keerom

**PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI PAPUA
WILAYAH KEEROM**
Sekretariat: Pastoran Katolik St. Willibrordus, Arso Kota

Arso, Oktober 2007

Laporan ini menggambarkan situasi hak asasi manusia di Kabupaten Keerom, khususnya Distrik Arso, Distrik Waris, Distrik Web, yang sekaligus merupakan wilayah pelayanan Gereja Katolik, Gereja GIDI, Gereja GKI, Gereja Baptis, dan Gereja Pentekosta.

Secara sistematis laporan ini terdiri dari:

- I. Pendahuluan
- II. Pola intimidasi yang dialami masyarakat Keerom
- III. Penyampaian aspirasi kepada Muspida Keerom
- IV. Kesimpulan
- V. Rekomendasi

I. Pendahuluan

Kabupaten Keerom adalah pemekaran dari Kabupaten Jayapura berdasarkan UU No. 26/2002 tentang Pembentukan Kabupaten Keerom, Sarmi, Sorong Selatan, Raja Ampat, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digul, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama. Keerom terdiri dari 5 distrik, yakni Skanto, Arso, Waris, Senggi, dan Web. Menurut catatan *Papua dalam Angka 2006* yang diterbitkan oleh BPS Papua, wilayah ini berpenduduk 37.927 jiwa yang mendiami wilayah seluas 936 km².

Kabupaten ini berbatasan dengan negara Papua New Guinea di Timur tetapi penduduk asli di wilayah ini memiliki wilayah adat, bahasa dan budaya yang sama dan hanya dibedakan oleh garis batas politis antara RI dan PNG. Karena itu, hubungan kekeluargaannya tetap berjalan baik dan utuh hingga saat ini. Warga kedua suku sehari-hari saling menyeberangi tapal batas kedua negara untuk berkebun, berburu dan mengumpulkan bahan makanan, atau menghadiri pesta-pesta adat dan acara keluarga lainnya.



Sebagai masyarakat asli Papua yang mendiami wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG, masyarakat Keerom merupakan komunitas yang hidup dalam trauma mendalam dan berkepanjangan karena berkali-kali mengalami tindak kekerasan militer akibat dari pergolakan politik dan keamanan sejak tahun 1962, Papua diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia. Akibatnya, berulang kali masyarakat Keerom melakukan pengungsian ke PNG untuk menyelamatkan diri. Gelombang pengungsian terjadi berkali-kali, yakni, sekitar tahun 1962-1969, periode 1970-1978 dengan jumlah yang cukup besar, dan terakhir di era 1980-an.

Tentang perilaku satuan Kopassus Tribuana, dilaporkan bahwa pasukan elit TNI-AD ini mulai didatangkan kembali ke wilayah perbatasan sejak awal tahun 2007. Kehadiran mereka tidak dalam bentuk memiliki pos sendiri, melainkan menyatu dalam Pos Satuan Tugas TNI yang dinamakan Pos Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pam Perbatasan/Satgas Pamtas) yang didatangkan secara bergantian dari berbagai kesatuan di luar Papua dan

tersebar dari Kampung Yeti-Kriku di Timur hingga Kampung Towe Hitam di bagian selatan Kabupaten Keerom; meliputi Distrik Arso, Skanto, Distrik Waris, Distrik Senggi dan Distrik Web. Masa tugas setiap Satgas PAM Perbatasan berkisar antara 9 bulan hingga 1 tahun, kemudian digantikan dengan kesatuan berikutnya.

Anggota Satgas Pengamanan Perbatasan di Keerom saat ini berasal dari Yonif 407/ dari KODAM Diponegoro, Jawa Tengah dan Yonif 521 dari KODAM Brawijaya, Jawa Timur. Dilaporkan bahwa terdapat berbagai pos TNI SATGAS PAM Perbatasan yang tersebar di kampung-kampung di wilayah Keerom dan bercampur dengan anggota Satuan Kopassus. Khusus untuk Distrik Waris, sepanjang jalan dari Arso menuju Senggi dan Web, terdapat 9 pos Satgas TNI, 1 pos Koramil dan aparat Polsek.

Di Distrik Arso, Satuan Kopassus ini tinggal di pemukiman warga, dengan menyewa rumah milik warga setempat dan kemudian ditempati oleh sekitar 5 orang. Masing-masing berada di Arso 2, Jalur 4, Wembi, Inti 4, Tami PTP, PIR 4, Arso 8, Yeti, Arso 14, Arso 3, dan Arso 12 (di pabrik pengolahan kelapa sawit).

Dari pengamatan masyarakat, aktivitas sehari-hari anggota Kopassus Tribuana ini lebih menonjol bila dibandingkan dengan anggota Satgas PAMTAS lainnya maupun anggota Koramil setempat. Dalam bertugas, mereka umumnya menggunakan pakaian preman sehingga identitas yang sebenarnya tidak banyak diketahui oleh warga kampung.

II. Pola intimidasi yang dialami oleh masyarakat Keerom

Berikut ini dicatat serangkaian tindakan anggota Satgas TNI yang selama ini menciptakan keresahan dan menambah trauma bagi masyarakat di wilayah perbatasan Keerom, yang sempat terdata dengan baik. Termasuk pula tindakan-tindakan di luar aturan hukum yang dilakukan anggota Kopassus Tribuana yang saat ini ditempatkan di Kabupaten Keerom.

A. Peristiwa-Peristiwa Traumatis dalam Kurun Waktu 2000 – 2005

Wilayah Distrik Arso

1. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

12 September 2003: anggota Satuan Intel Kodam XVII/ Trikora menangkap dan menahan dua orang warga Ampas bernama Karel Yafok dan Leo Mangga pada malam hari dan baru dilepaskan pada keesokan harinya dalam keadaan babak belur. Keduanya ditangkap dan ditahan karena tuduhan mencuri senjata milik TNI yang hilang pada 1 Juli 2003. Atas alasan yang sama seorang warga Wembi, Distrik Arso, bernama Piet Pikeukir, mantan Kepala Desa Wembi pada pk. 24.00 ditangkap dan ditahan selama dua hari di Makodam XVII/ Trikora.

2. Intimidasi

12 Januari 2005: seorang anggota TNI bernama Serda Ibrahim dan Kopda Ronny dari Pos 31 Karang, Kesatuan Yonif 432 melakukan penembakan ancaman kepada 9 orang warga asli Arso di hutan Arso 1. Peristiwa ini terjadi bermula dari masalah antara 2 orang warga transmigrasi Sanggaria Arso 1 yang berasal dari suku Jawa menangkap ikan dengan menggunakan racun ikan dan strom listrik di kawasan yang merupakan tempat masyarakat asli arso menjaring ikan. Melihat kegiatan tersebut, 9 warga asli Arso marah kepada 2 warga transmigrasi ini. Kedua warga transmigrasi Arso 1 pergi melapor kepada anggota di pos 31 Karang. Kedua anggota Yonif 432 tersebut datang ke lokasi pencarian ikan dan melakukan penembakan ancaman kearah 9 orang warga Arso tersebut. Meskipun tembakan tersebut tidak mengenai para korban, tindakan ini membuat korban dan warga Arso secara umum menjadi trauma dan hidup dalam ketakutan.

3. Penganiayaan terhadap Aiptu Anton Hilapok

Pada tanggal 14 Oktober 2005, **Aiptu Anton Hilapok** yang adalah anggota Polisi pada Polres Persiapan Keerom berniat pulang setelah menjalankan tugasnya. Saat itu Aiptu Anton Hilapok menggunakan pakaian preman. Ketika melewati tempat ojek Arso 2, Anton melihat seorang pemuda bernama Abner yang adalah ipar seorang informan polisi bernama Yosep Turot sedang dipukuli oleh beberapa orang yang dikenalnya sebagai anggota Kopassus. Disana juga berdiri Danpos Kopassus dari Arso 2. Melihat hal tersebut, Anton segera menuju ke pos ojek itu. Tetapi pada saat itu dirinya malah ditendang oleh salah seorang anggota Kopassus itu tepat di bagian ulu hatinya hingga pingsan, tidak sadarkan diri. Kemudian Anton Hilapok ditolong oleh seorang warga transmigrasi Arso 2 bernama Jamijan, yang mengangkat tubuhnya dan menidurkannya diatas bangku pangkalan ojek. Setelah sadar, Anton pada saat itu hendak mengejar pelaku ke rumah / tempat tinggal para pelaku (anggota Kopassus) di Arso 2. Rumah ini milik warga yang disewa dan ditempati oleh para anggota kopasus ini. Namun

niatnya dibatalkan karena Kepala Desa Arsi 2, Bapak Louis Womsiwor yang menenangkannya. Akibat perlakuan ini, Anton Hilapok mengalami sakit selama 5 hari dan diobati di poliklinik Santa Lusia Workwana. Masalah ini diselesaikan di Polres, dan langsung ditangani oleh Kapolres persiapan, Keerom.

Wilayah Distrik Web

1. Menciptakan keresahan dan suasana tidak damai

Selama bulan November 2002-Maret 2003, masyarakat di Kampung Yuruf dan Kampung Amgotro, Distrik Web, resah akibat tindak-tanduk anggota Satgas Yonif 413/Kostrad-Bremoro asal Kodam Diponegoro yang ditugaskan di wilayah itu. Mereka sering mengambil biji coklat kering dan kulit Kayu Masohi milik warga tanpa bayaran yang wajar lalu diangkut ke Jayapura dengan helicopter TNI yang secara teratur mengantar bahan makanan milik pasukan di pos-pos perbatasan; mengganggu ibu-ibu rumah tangga saat suami mereka tidak berada di rumah; berkeliling rumah warga pada malam hari dan memata-matai aktifitas warga; serta memasuki Pastoran Yuruf dan memeriksa arsip-arsip milik pastoran tanpa ijin¹.

2. Kekerasan terhadap perempuan dan perekrutan TBO

Dalam laporan yang disampaikan oleh Keuskupan Jayapura kepada Pangdam XVII/ Trikora, Mayjend. (TNI) Mahidin Simbolon tertanggal 14 Januari 2003² tentang suasana umat di Ubrub dan Yuruf, Distrik Web sesuai pengaduan dari masyarakat, disebutkan perilaku-perilaku anggota Satgas TNI yang meresahkan, seperti: sejumlah gadis dan ibu rumah tangga yang dijadikan pelayan 'seks' bagi pasukan. Akibatnya, ada ibu rumah tangga yang terpaksa bercerai dengan suaminya dan ada pula yang meninggal dunia karena tekanan batin; perekrutan anak-anak muda sebagai Tenaga Bantu Operasi yang kemudian bebas melakukan tindak kekerasan di kampung-kampung; mengambil ternak peliharaan dan hasil tanaman milik warga tanpa permisi; dan memaksa sejumlah warga untuk menjual barang kios milik pasukan, kemudian menjelang waktu pergantian pasukan, si penjual dipaksa menyerahkan uang untuk menggantikan barang kios tersebut yang jumlahnya kadang amat besar dan tidak mampu ia dipenuhi.

¹ Lihat laporan kepada Pangdam XVII/Trikora, Brigjen (TNI) Nurdin Zainal, MM tertanggal 29 Maret 2003, (*Arsip surat No. 272/FK/03/3.4.7.*).

² Surat Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Kepada Pangdam XVII/ Trikora No.: 015/TB/03/3.4.7.

Akibatnya, si penjual ketakutan dan memilih pergi dari kampung sampai pasukan tersebut diganti.

3. Menciptakan suasana ketakutan

Pada Mei 2005, Koramil Web mengedarkan formulir yang di dalamnya tertera nama kepala-kepala desa, sekretaris desa, kepala suku dan tokoh agama di wilayah Web dengan kolom-kolom yang berjudul: Pro NKRI, Anti NKRI dan Ragu-Ragu/Tidak Punya Sikap. Tindakan ini menimbulkan ketakutan bagi masyarakat Web³. Setelah ada laporan dari Uskup Jayapura, Dandim 1701 Jayapura bertindak menangani masalah yang dilaporkan.

Wilayah Distrik Waris

1. Melakukan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan

Sejumlah pasukan Satgas TNI yang bertugas di Kampung Banda dan Kali Bom, Waris, terbukti menghamili beberapa anak gadis dan perempuan bersuami serta meninggalkannya begitu saja dengan anak-anak berdarah campuran dan tak berayah yang berusia antara 3-7 tahun⁴. Para perempuan yang menjadi korban, orangtuanya maupun anak yang dilahirkan, senantiasa hidup tertekan, baik secara psikologis, ekonomi maupun sosial dan terancam kehilangan masa depan. Mereka menjadi objek perbincangan masyarakat; sang perempuan dianggap kotor karena telah mempunyai 'aib' dan anak tersebut dianggap sebagai '*anak haram*'.

2. Terlibat bisnis

Sepanjang tahun 2005: Melimpahnya hasil hutan yang bernilai ekonomis tinggi di Keerom seperti kayu log dan kulit kayu Masohi, mengundang berbagai pihak untuk berupaya mengais keuntungan di dalamnya. Sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat Keerom bila oknum-oknum anggota TNI yang ditugaskan mengamankan perbatasan sering terlibat berbisnis coklat, vanili dari PNG, kulit kayu Masohi, burung cenderawasih, bahkan minuman keras. Masyarakat sendiri berswadaya menanam coklat dan hasilnya sudah dipasarkan di Jayapura. Sedangkan tanaman vanili merupakan komoditas pertanian yang baru saja dibudidayakan dalam dua tahun belakangan dan sudah mulai berbuah.

³ Lihat Laporan Uskup Jayapura kepada Dandim Jayapura tanggal 15 Mei 2005, No.: 087/2005/1.1.5.38

⁴ Identitas korban maupun saksi disimpan oleh Keuskupan Jayapura.

B. Pola Tindakan Intimidatif oleh Satuan Kopassus TRIBUANA tahun 2007

Wilayah Distrik Arso

1. Menciptakan suasana ketakutan

Sekitar akhir Juni 2007, Komandan Kopassus Kotis Tami mengeluarkan surat yang berisi adanya rencana penyerangan dari anggota OPM bertepatan dengan 1 Juli 2007. Penyerangan ini akan didukung oleh simpatisan yang tinggal di kampung. Akibat berita ini masyarakat mengalami ketakutan, saling curiga, dan tidak tidur selama beberapa hari karena harus berjaga di rumah masing-masing.

2. Tuduhan dan intimidasi terhadap warga

5 September 2007 sekitar jam 11.00 waktu Papua, bertempat di Kampung Wembi, Distrik Arso, Bapak Lambert Amo dan seorang rekannya yang membawa 15 karung berukuran 50 kg berisi biji coklat (1 ton) miliknya untuk dijual di Jayapura dengan menumpang mobil milik Bapak Ipang (sopir taxi Jayapura-Waris, asal Sulawesi), ditahan oleh anggota Kopassus di Pos Satgas TNI di Wembi. Kepada kedua bapak ditanyakan apakah coklat ini milik Pastor John Djonga! Bahkan ditanyakan juga dimana posisi pastor. **“Kalau coklat ini milik Pastor, kasih turun di sini”**, ujar sang anggota tadi. Bapak Lambert menjawab bahwa coklat yang ada adalah miliknya, bukan milik pastor. Dan memang benar, coklat tersebut baru saja dipanen dari kebunnya sendiri. Namun anggota Kopassus tadi mengatakan beliau berbohong dan tetap bersikeras mengatakan karung-karung coklat itu pasti milik Pastor John seraya menanyakan dengan nada yang kasar apakah pastor memiliki surat ijin perdagangan coklat. Mendengar pertanyaan itu, Bapak Lambert tetap menegaskan hal yang sama dan meminta sopir untuk melanjutkan perjalanan ke Jayapura.

3. Pemukulan terhadap Kepala Distrik Arso, Bpk. Charles Tafor

Pada hari Kamis, 18 Oktober 2007 sekitar pk.19.00, seorang anggota Kopassus bernama **Sertu Dedy** mengendarai mobil dinas yang diduga milik Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Keerom, Bpk. Antonius Sumaryanto dari arah Abepura. Saat sampai di Jalan Arso II, mobil ini bertemu dengan mobil lain yang dikemudikan oleh Kepala Distrik Arso, Bapak Charles Tafor, yang datang dari arah Arso Kota. Karena mobil yang dikendarai Kopassus menggunakan lampu jauh, maka Bpk. Charles memberi tanda berkedip agar lampu jauh diganti. Tetapi peringatan ini tidak dihiraukan sehingga Bpk. Charles juga menyalakan lampu jauh.

Tindakan ini berakibat Sertu Dedy menghentikan mobilnya dan memukul Bpk. Charles sebanyak dua kali ke arah kepala tetapi ditangkis oleh Charles. Charles mengatakan kepada Sertu Dedy bahwa dirinya adalah Kepala Distrik Arso Kota, namun hal itu tidak dihiraukan oleh Sertu Dedy. Malah Dedy mengeluarkan kata-kata, **“Kepala Distrik apa, kepala distrik bodok, ko kepala distrik kah, masyarakatkah terserah”**. Tindakan ini mengakibatkan istri dan anak-anaknya menjerit minta tolong. Mendengar teriakan isteri Charles, Sertu Dedy cepat-cepat melarikan diri. Akan tetapi, masyarakat telah mendengar kejadian ini dan segera melakukan aksi pemalangan jalan dari Arso VII ke Workwana dengan menebang pohon-pohon di kiri-kanan jalan tersebut hingga keesokan harinya (19 Oktober 2007). Dalam aksi ini, masyarakat menuntut agar Pangdam, Kapolda, dan Bupati turun tangan langsung guna menyelesaikan masalah tersebut. Namun kenyataannya hanya Bupati yang turun menghadapi massa. Tuntutan massa adalah [1] pelaku dipecat dari jabatannya dan Kopassus ditarik dari Keerom, [2] Kepala Dinas Pertanian yang terbukti meminjamkan mobil dinasnya ditindak tegas oleh Bupati, [3] jika tidak ada penyelesaian secepatnya, masyarakat akan melakukan pemalangan pada hari Senin atau Selasa pada minggu berikutnya.

Wilayah Distrik Web

1. Menyebarkan isu pembelian senjata⁵

Pada bulan April 2007, sejumlah anggota Kopassus dari Desa Ubrub, Distrik Web, bekerjasama dengan Serka Hugo Mofu, anggota Koramil Ubrub, melakukan pemutarbalikan fakta dengan menyebarkan isu masyarakat Desa Yuruf membeli dan menyimpan senjata. Fakta yang terjadi adalah Serka Hugo Mofu melakukan pelanggaran asusila dan mendapatkan denda adat dari pihak keluarga isteri. Karena tidak menerima perlakuan ini, Serka Mofu bersama anggota Kopassus mengalihkan fakta menjadi soal pencarian senjata yang disimpan oleh masyarakat Yuruf. Tindakan ini mengakibatkan sejumlah keluarga mengungsi ke dusun-dusun.

2. Pemaksaan pembacaan ikrar pada upacara peringatan 17 Agustus 2007

Pada peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus 2007, apa perintah dari Kopassus agar Kepala Suku di Web menjadi inspektur upacara. Tetapi Kepala Distrik Web, Barnabas Taygat mengatakan sesuai dengan instruksi Bupati kepada seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Keerom, maka yang

⁵ Laporan Uskup Jayapura kepada Dandim 1701 Jayapura No. 259/BD/07/3.4.7 tertanggal 18 Mei 2007.

harus menjadi inspektur upacara adalah dirinya selaku Kepala Distrik Web, dan bukan seorang kepala suku. Karena itu Kadistrik tetap menjalankan instruksi tersebut. Pada saat upacara berlangsung, pihak Kopassus menyerahkan sebuah teks ikrar yang isinya juga tidak diketahui sebelumnya oleh Kepala Distrik. Ikrar tersebut harus dibacakan oleh inspektur upacara. Karena upacara sedang berlangsung, maka Barnabas Taygat selaku Kepala Distrik Web membacakan saja teks yang diberikan oleh pihak Kopassus. Isi teks tersebut adalah sebuah ikrar masyarakat Web untuk tetap setia kepada NKRI. Meskipun melihat isi ikrar yang terlihat aneh tersebut, kepala Distrik terus saja membacakan karena upacara sedang berlangsung. Sementara itu, mendengar isi ikrar tersebut, warga dari seluruh kampung di Distrik Web yang pada saat itu hadir dalam upacara tersebut heran dan bertanya-tanya. Masyarakat mengatakan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia tetapi mengapa ada pernyataan demikian sehingga seakan-akan mereka semua bukan warga negara Indonesia.

3. Pencegatan dan pemeriksaan kartu identitas Kepala Distrik Web dan kepala Desa Dubu oleh kesatuan 521/pos Kali Paw

Pada tanggal 19 Agustus 2007, Kepala Distrik Web, Barnabas Taygat bersama dengan Kepala Desa Dubu, warga masyarakat Dubu dan 2 orang anggota Koramil, menuju ke Desa Dubu dengan menggunakan truk. Kepala Distrik dan 2 orang anggota Koramil yang kebetulan adalah orang asli Papua ini mengantar warga Dubu yang baru selesai mengikuti upacara 17 Agustus di ibukota distrik. Untuk mencapai Desa Dubu, jalan yang harus di tempuh adalah melalui Kali Paw, Waris, karena jalan berputar. Setibanya mereka di Pos Kali Paw, mereka dicegat oleh petugas di pos tersebut. Kepala Distrik menjelaskan bahwa dia adalah kepala distrik web, yang sedang mengantar Kepala Desa Dubu bersama warga desa Dubu. Meskipun demikian petugas tidak percaya dengan kata-kata kepala distrik sehingga kepala distrik harus menunjukkan kartu identitasnya. Mereka terus ditanyai, termasuk 2 orang anggota Koramil yang adalah orang asli Papua yang pada saat itu tidak membawa kartu anggotanya. Namun mereka juga memberikan nomor anggota serta identitas dan pangkat mereka kepada petugas pos. Setelah memeriksa semua yang ikut dalam rombongan tersebut, akhirnya mereka dipersilahkan meneruskan perjalanan.

Wilayah Distrik Waris

1. Mengajukan pertanyaan bernada interogasi

Dalam bulan April-Oktober 2007, setiap warga Waris yang pulang dari berkebun, atau setelah beraktivitas dari hutan seperti berburu dan mengumpulkan bahan makanan (menokok sagu, memetik sayur, dll), atau pulang mandi dari sungai yang dekat dengan hutan, dengan serta-merta disambut anggota Kopassus dengan pertanyaandan pernyataan penuh kecurigaan bahkan tuduhan seputar tiga hal pokok: **anggota OPM, penyimpanan senjata dan bendera Bintang Kejora.**

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, seperti:

- Apa kamu warga baru di sini? Kamu tiga hari ini ke mana?
- Apa kamu tahu siapa mantan anggota OPM?
- Kenapa pulang dari hutan dengan membawa busur-panah?
- Apa kamu yang menyimpan senjata? Di mana?
- Siapa yang simpan bendera Bintang Kejora?
- Kepada masyarakat yang pulang memanen coklat dari kebun mereka, ditanyakan asal-muasal coklat itu dan hendak dijual ke mana.

Sepintas lalu pertanyaan-pertanyaan ini tidak terlalu istimewa tetapi karena diajukan berulang kali dan berlangsung setiap hari ketika bertemu warga masyarakat, mereka benar-benar merasa hidupnya tidak bebas lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masyarakat mengaku bahwa anggota Kopassus tersebut sebenarnya sudah mengenal dengan baik identitas dan status mereka sebagai warga di kampung berikut sumber mata pencaharian mereka di setiap keluarga yang ada. Pernah orang pos juga memerintahkan warga Banda menulis nama kepala keluarga lalu dipancang di depan pintu rumah masing-masing. Hal ini membuat warga masyarakat makin takut meski sampai pasukan pindah warga tidak menjalankan instruksi itu.

Selain di Waris dan Web, upacara yang sama dengan pembacaan ikrar kesetiaan juga berlangsung di distrik lainnya seperti di Distrik Senggi. Bagi masyarakat, peristiwa pembacaan ikrar dalam upacara peringatan 17 Agustus semacam ini sebelumnya tidak pernah terjadi sehingga masyarakat merasa ada situasi yang aneh dan mereka mulai was-was sampai sekarang.

2. Tindak pemaksaan menjelang Upacara 17 Agustus 2007

Dalam persiapan upacara peringatan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2007 di Waris, sejak 13 Agustus, masyarakat ditekan untuk mengibarkan bendera Merah Putih di depan rumah-rumah mereka. Kemudian Kepala Suku Besar Walsa, Bapak Nerius May (63 tahun) yang sehari-hari tinggal di Koya Koso, dijemput pada 16 Agustus pagi oleh Danramil Waris, Letnan

Satu Agus, karena diminta oleh Kopassus untuk menjadi inspektur upacara 17-an keesokan harinya dan membacakan sambutan yang telah disusun Kopassus dalam upacara bendera di ibukota distrik, Kampung Pund Dusun Dawa. Bapak Nerius sebenarnya menolak permintaan itu, namun karena takut, iapun berangkat ke Waris dan dijadikan inspektur upacara.

Pada 16 Agustus sekitar jam 5 sore, Kepala Suku Banda, Gaspar May (42 thn) didatangi anggota Kopassus di rumah dan memintanya menghadap Komandan Kopassus Pos Banda, Letnan Satu Usman. Namun permintaan ini ditolaknya karena ia merasa lelah. Kemudian datang lagi seorang anggota Kopassus kira-kira jam 18.30 waktu Papua dan memintanya datang ke Pos Satgas, namun ia beralasan belum mandi. Dan untuk ketiga kalinya, sekitar jam 20.00 datang lagi seorang Kopassus menggunakan sepeda motor dan meminta Bapak Gaspar menghadap komandan Kopassus tersebut. Bp. Gaspar terpaksa ikut dengan berboncengan pada motor tadi menuju Pos Satgas. Saat tiba, komandan mengajaknya minum minuman beralkohol merk Vodka sebanyak 1 botol. Lalu kepadanya disodorkan sebuah pernyataan ikrar yang disusun Kopassus dan diminta agar ikrar ini dibacakan pada upacara 17-an keesokan harinya dengan menggunakan pakaian adat lengkap. Adapun isi ikrar tersebut berbunyi, "**Kami masyarakat Waris, besar-kecil masih sangat setia pada NKRI, lambang negara burung Garuda, bendera Merah Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya**".

Bapak Gaspar menolak permintaan memakai pakaian adat saat upacara besok karena menurutnya upacara dimaksud bukanlah sebuah pesta adat orang Waris. Karena merasa tidak tenang dengan permintaan komandan Koppasus ini, pada 17 Agustus pagi, Bapak Gaspar datang ke pastoran dan bertemu Pastor John Djonga, Pr., dan mengatakan bahwa saat upacara nanti ia akan membacakan ikrar yang disodorkan Kopassus. Merasa semakin takut, ia minta Pastor John untuk jalan bersama-sama menuju halaman kantor Distrik Waris guna mengikuti upacara. Dalam upacara itu Bapak Gaspar terpaksa membacakan ikrar di atas menggantikan teks Pancasila⁶.

3. Merekrut warga sipil sebagai Tenaga Bantu Operasi (TBO)

Sejumlah anak muda dan orang dewasa di beberapa kampung yang dijadikan pos militer, didekati dengan cara memberi perhatian khusus,

⁶ Dapat dibaca juga dalam Tabloid *Suara Perempuan Papua* edisi 15-21 Agustus 2007, hal. 5.

supermi, rokok dan makan minum kemudian dijadikan sebagai tenaga bantu operasi. Mereka setiap hari berada di pos, makan-minum, tidur dengan pasukan, dan membantu bisnis komandan. Jumlahnya bervariasi antara satu pos dengan pos lainnya. Misalnya, untuk Kampung Banda, ada 4 orang. Satu diantaranya berinisial (L) terlihat membantu komandan Kopassus menebang kayu besi dan menjualnya ke perusahaan yang sedang membangun proyek perumahan di Yabanda. Komandan beberapa kali menghadang miras kepada tokoh-tokoh yang datang bertamu. Ini dialami oleh seorang Kepala Suku bernama Gas May dari kampung Banda.

Salah satu pekerjaan mereka yang turut menciptakan ketakutan dan memecah-belah warga adalah memata-matai setiap aktivitas warga dan melaporkannya ke pos sehingga warga diperiksa dan diintimidasi anggota Kopassus. Misalnya, seorang pengurus gereja mengaku bahwa pada tanggal 17 Agustus, ia dipanggil dan ditanya oleh seorang anggota Kopassus, "Ke mana saja ia selama tiga hari ini". Warga tersebut menjawab bahwa ia pergi ke Kampung Boda, PNG karena ada kedukaan. Hal ini menyadarkan dia bila ada warga tertentu yang selalu melaporkan aktivitas warga di kampung kepada Kopassus. Mereka-mereka ini diketahui selalu datang ke pos untuk mencari rokok atau minuman keras.

4. Tindakan intimidasi terhadap warga terkait dengan Pastor John Djonga, Pr

Pastor John Djonga, Pr (48 tahun) sudah bertugas sebagai Pastor Paroki St. Michael Waris selama 8 tahun. Intimidasi yang dirasakannya bemula saat penyampaian laporan keadaan masyarakat perbatasan Keerom dalam forum dialog antara masyarakat dengan Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH di sela-sela program 'TURKAM' Gubernur ke Kampung Workwana, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, pada tanggal 23-24 Juli 2007. Dalam pertemuan tersebut, Pastor John diminta oleh beberapa kepala suku dan warga masyarakat asal Distrik Waris, Yetti Kriku, Wembi, Distrik Arso, Distrik Senggi dan Distrik Web yang merasa takut atas keselamatan mereka, untuk menyampaikan berbagai tindakan pasukan TNI yang bertugas di wilayah itu yang belakangan ini meresahkan masyarakat. Penyampaian ini dilakukan dengan maksud, meminta perlindungan dari Gubernur, sekaligus mendesak Gubernur untuk meminta pasukan TNI menghentikan tindakan mereka karena telah membuat masyarakat sangat ketakutan.

- a. Peristiwa pertama: sekitar akhir Juli 2007.

Setelah berdialog dengan Gubernur Papua di Arso, semua warga Waris yang hadir di Workwana pulang ke Waris, kecuali Pastor karena masih ada urusan di Arso. Beberapa hari sesudah itu, seorang kepala suku dipanggil ke Pos Satgas oleh komandan Kopassus Usman dan menanyakan tentang apa saja yang disampaikan Pastor John kepada Gubernur di Arso. “Mengapa ia menjelek-jelekkan kami Kopassus?”, tanyanya kepada sang kepala suku. Ada 4 orang yang turut menyaksikan pembicaraan ini⁷. Beberapa warga lain juga mengaku mendapat pertanyaan yang sama namun merasa takut untuk menyampaikannya kepada pastor saat itu. Bahkan ada anak-anak muda yang sering bertamu ke pastoran menerima pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah mereka mempunyai hubungan keluarga atau seasal dengan Pastor John.

b. Peristiwa kedua: 13 Agustus 2007.

Beberapa warga Waris yang sedang mengangkut kayu papan dan balok di tengah hutan Jalan Pund-Base camp Kantor Distrik Waris yang berjarak kira-kira 2 km dari Kampung Pund untuk keperluan pembangunan gedung pastoran Waris, tiba-tiba didatangi 2 anggota Kopassus. Kepada warga diajukan pertanyaan-pertanyaan berikut: balok-balok ini milik siapa? Warga menjawab, “Balok-balok tersebut milik pastor (gereja) untuk keperluan pembangunan gedung pastoran Waris”. Lalu kepada seorang bapak⁸ lain yang kebetulan pengurus Dewan Paroki Waris ditanyakan apakah dia merupakan orang baru di Waris yang kemudian dijawabnya, “bukan”, karena ia warga setempat dan malah sehari-hari terlibat mengurus gereja. Seorang anggota lainnya membenarkan keterangan Bapak tadi dan mengakui bahwa orang inilah yang pernah mengantar mereka ke tugu perbatasan RI-PNG di Waris. Kemudian rentetan pertanyaan berikut diajukan kepada bapak tadi:

- Kamu sering datang ke pastor itu omong apa, ia omong apa saja?
- Hari-hari apa pastor ke Jayapura, jam berapa?
- Untuk apa pastor itu turun-naik Jayapura?
- Di Jayapura ia tinggal di mana?
- Apa itu gereja mandiri?
- Pastor itu kenapa tidak pasang bendera merah putih? Ia sebenarnya mau apa?

c. Peristiwa ketiga: menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2007.

⁷ Nama-nama saksi disimpan oleh Keuskupan Jayapura.

⁸ Idem

Seorang warga mengaku bahwa sebelumnya pada 13 Agustus, ketika mereka mengangkat papan dan kayu balok dari hutan untuk keperluan pembangunan pastoran, mereka sempat dibuntuti oleh dua anggota Kopassus dan diinterogasi dengan berbagai pertanyaan seputar aktivitas Pastor John. Warga ini mengaku sangat takut dengan situasi terakhir Waris dan mau mengungsi ke PNG untuk mencari perlindungan. Kepada Pastor, warga ini juga mengatakan bahwa pada 13 Agustus itu mereka diminta anggota Kopassus untuk memasang bendera Merah Putih di depan rumah-rumah mereka dalam rangka peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus. Mereka juga ditanya, mengapa Pastor belum memasang bendera di pastoran!

Sampai tanggal 16 Agustus sore, anggota Kopassus terus-menerus datang ke pastoran untuk memeriksa apakah bendera Merah Putih sudah dipasang atau belum. Menjelang 17 Agustus tersebut, Pastor John sendiri baru tiba di Waris pada 16 Agustus malam dan langsung meminta para pemuda untuk memasang bendera di halaman pastoran. Komandan Koramil, Letnan Satu Agus juga turut memeriksa hal yang sama, bahkan menyuruh Sersan Pono datang ke pastoran pada 16 Agustus sekitar jam setengah 9 malam untuk melihat apakah bendera sudah dipasang atau belum.

Menurut pengakuan seorang warga, beberapa waktu sebelumnya Komandan Koramil pernah mengancam akan menembak Pastor John yang dinilainya selalu menghambat pembangunan di Waris. Sikap Danramil ini mulai terlihat setelah Pastor mengungkapkan keberatannya atas permintaan tanda tangan sebagai saksi dalam pelepasan tanah adat untuk kepentingan pembangunan Pos Satgas Banda di Waris. Walau demikian, Pos tersebut saat ini sedang dibangun setelah ganti rugi atas tanah 1 ha seharga Rp 10 juta dibayarkan langsung kepada Kepala Suku Frans May yang mengaku dipaksa untuk menandatangani surat pelepasan tanah adat itu. Dalam transaksi, ada hal yang aneh dimana surat pelepasan tanah adat justru dibuat oleh Danramil Waris, bukan lazimnya oleh pemilik tanah.

- d. Peristiwa keempat: ancaman di hadapan tim wartawan Tabloid *Suara Perempuan Papua* (TSPP) yang berkunjung ke Waris pada 22 Agustus 2007.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka peliputan berita seputar kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keamanan di tapal batas. Tiba pada 22 Agustus siang, tim mulai mengumpulkan informasi dari masyarakat. Dan

pada jam 17.00 waktu Papua, kedua wartawan bertemu ke Pos Satgas Banda dan diterima oleh **Letnan Satu Usman**.

Sejumlah pertanyaan tentang keadaan pendidikan dan kesehatan masyarakat perbatasan diajukan dan dijawab baik oleh komandan. Misalnya, dijelaskan tentang penyakit yang umum diderita masyarakat Waris adalah malaria. Namun ketika diajukan pertanyaan tentang situasi keamanan di wilayah perbatasan, seperti, soal pelintas batas, pemeriksaan: alat tajam/senjata tajam dan KTP oleh Pos Satgas, sang komandan seketika menanggapi dengan nada tinggi sambil mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. **“Kami sudah tahu siapa yang selalu membuat laporan tidak benar itu. Ada satu orang, ia pendatang, yang punya jaringan dengan LSM dalam dan luar negeri. Orang itu pengkianat NKRI, ia provokator, ia pelayan Tuhan. Yang macam itu harus kita kuburkan 700 meter dalam tanah”**. (Baca juga dalam TSPP edisi 22-29 Agustus 2007, hal. 7). Sejam lamanya wawancara berlangsung, mereka kemudian kembali ke pastoran untuk istirahat. Hari sudah malam.

Tidak seberapa lama ketika tim wartawan itu tiba di pastoran, Letnan Usman menyuruh 2 orang anggotanya ke pastoran dengan tujuan membeli pisang masak pada seorang ibu yang sehari-hari bertugas masak di pastoran (mama dapur). Mama dapur mengatakan pisang tidak ada dan sambil membentak ia balik bertanya, **“Tadi siang kamu dua ada di pasar dan ada pisang, kenapa tidak beli di sana saja daripada datang cari ke pastoran malam-malam begini? Di sini bukan tempat jual pisang”**. Kedua anggota pamit lalu pulang. 15 menit kemudian, datang lagi dua anggota Kopassus lainnya dengan tujuan menelpon melalui warung telepon satelit milik paroki. Beberapa menit sesudah itu, datang lagi seorang anggota pos TNI lain hendak menelepon tetapi membatalkan niatnya dan pulang ke Pos.

Melihat gelagat yang tidak aman seperti di atas, para wartawan memutuskan untuk keluar dari Waris sekitar jam 9 malam menuju Kampung Ampas dan bermalam di sana. Karena merasa informasi yang dikumpulkan belum lengkap, pada 23 Agustus pagi, kru TSPP memutuskan kembali ke Waris untuk melengkapinya. Sekitar jam 12 siang ketika mereka hendak pulang ke Jayapura dan mobil yang ditumpangi melewati depan Pos, satu anggota berpakaian preman minta ikut di mobil tersebut. Namun baru sampai di pertigaan jalan yang berjarak sekitar 5 km (*15 menit perjalanan*) dari Pos dengan hutan lebat di sekelilingnya, ia minta diturunkan dengan

alasan, menunggu kawannya yang akan menjemputnya dengan motor untuk kembali ke Pos Banda. Seluruh berita yang dikumpulkan pada kesempatan ini telah dimuat di Tabloid *Suara Perempuan Papua* pada edisi 15-21 Agustus 2007.

Setelah menerima informasi tentang pernyataan yang bernada ancaman yang disampaikan komandan Kopassus kepada tim wartawan TSPP, pada 24 Agustus 2007 Pastor John memutuskan untuk kembali ke Waris. Tiba di Waris, Pastor menanyakan situasi terakhir ini kepada beberapa warga dimana pengakuan mereka tercatat pada poin "c" di atas.

III. Penyampaian aspirasi masyarakat kepada Muspida

Wilayah Distrik Waris

Pada 25 Agustus 2007, 4 anggota DPRD dan pimpinannya, Konrad Gusbager, melakukan kunjungan kerja ke Distrik Waris. Mereka bermalam di kamp kontraktor jalan PT Masa Indah. Malamnya para anggota DPRD ini mengunjungi Pastor dan Pastor menyampaikan perihal intimidasi aparat yang sedang terjadi di Waris. Lalu dalam acara tatap muka dengan masyarakat di kota Distrik keesokan harinya (26 Agustus), masyarakat mengadu berbagai hal, termasuk masalah keamanan berupa seringnya anggota Kopassus di Pos Banda mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang Pastor John. Selain itu, masyarakat melaporkan pula bahwa mereka sering ditanya soal senjata dan bendera Bintang Kejora. Selain masyarakat dan Pastor, dua anggota Koramil hadir dalam pertemuan ini tetapi tidak ada anggota Pos Satgas TNI Banda yang hadir pada saat itu.

Setelah mendengar aspirasi masyarakat, rombongan DPRD berjanji untuk melaporkan situasi ini kepada Danrem 172/Praja Wira Yakti Jayapura, Kol. Kav. Burhanudin Siagian dan mengupayakan kehadiran Danrem di Waris untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas. Tanggal 30 Agustus, rombongan tiba di Waris: Danrem Siagian, Wakil Bupati Keerom, Wafir Kosasih, Dandim 1701 Jayapura, Letkol. Napoleon, Ketua DPRD Keerom Konrad Gusbager, Kapolres Persiapan Keerom, AKBP. Bambang dan Ketua Dewan Adat Keerom, Bony Moenda yang juga anggota DPRD Keerom. Sebelum berlangsungnya pertemuan, Danrem Siagian menyatakan kepada Pastor John agar menyampaikan kepada masyarakat untuk bebas menyampaikan isi hatinya, termasuk tentang tindak-tanduk anggota TNI yang bertugas di Waris,

karena katanya, kunjungan ini dimaksudkan untuk mendengarkan keluhan masyarakat agar diselesaikan.

Dalam pertemuan ini, 6 orang perwakilan warga menyampaikan aspirasinya, termasuk Pastor John. Bapak Bony Moenda menjelaskan bahwa masyarakat Waris punya pengalaman pahit, panjang dan mendalam. Mereka adalah korban isu-isu politik Papua yang panas-dingin tidak menentu. Menurutnya, orang Waris telah beberapa kali mengungsi ke PNG. Periode pertama pengungsian sekitar tahun 1962-1969, periode kedua sekitar 1970-1978 yang jumlahnya cukup besar. Tahap terakhir adalah tahun 1980-an sampai sekarang. Tambahnya bahwa tahun 1995 ke atas adalah tahun untuk mereka membangun ketertinggalan dalam semua bidang kehidupan. **“Masyarakat Keerom ditindas oleh kata OPM. Dalam periode-periode tersebut di atas orang Keerom tidak berdaya. Mereka mengalami luka-luka yang sangat dalam”**, ujarnya.

Kemudian Pastor John sampaikan bahwa masyarakat Waris hanyalah korban isu-isu politik Papua. Namun dua tokoh mereka yang selama ini diincar TNI di perbatasan telah meninggal. **Bapak Yan Sewi** meninggal tahun 2003 dan terakhir **Bapak Amandus May** meninggal di kampung Banda pada bulan Juni 2007. Amandus dulu merupakan anggota Korem Jayapura yang kemudian desersi ke hutan. Tetapi di tahun 1980-an ia menyerah dan kembali menetap sebagai warga biasa di Kampung Banda. Ketika menyerah, ia membawa pulang 9 pucuk senjata laras panjang. Sekalipun sudah menyerah, ia masih saja diincar-incar TNI sampai wafat di usia 50-an tahun. Bahkan anaknya saat ini masih tetap diinterogasi oleh Kopassus tentang di mana senjata yang dibawa dan disembunyikan oleh almarhum ayahnya.

Pernyataan terakhir diungkapkan **Sersan Kepala Hamid** (asal Ternate, Maluku Utara), anggota Koramil Waris yang sudah bertugas selama 22 tahun. Ia menyatakan bahwa orang Waris itu baik. Yang membuat kekacauan adalah kelompok dari luar yang mestinya tahu diri. **“Yang bikin kacau itu bukan orang Waris, tapi itu perbuatan kita dari luar yang sok tahu namun tidak tahu. Jadi yang bikin kacau dan tidak aman di Waris adalah petugas. Orang Waris tidak pikir yang lain-lain. Mereka mau membangun dalam NKRI. Mereka tidak macam-macam. Mereka sudah hidup tenang. Hanya yang bikin kacau di negeri ini adalah anak-anak negeri ini, bukan orang Amerika atau orang Australia. Oleh karena itu kita harus refleksi diri, jangan bikin yang bukan-bukan karena yang menjadi korban adalah kita semua”**.

Mendengar semua ungkapan tersebut, Danrem Siagian memberi tanggapannya bahwa, tidak benar dan tidak etis bila anggota TNI menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada masyarakat. Bila ada anggota TNI yang melakukan hal serupa, ia meminta masyarakat jangan takut dan langsung melaporkan kepadanya melalui nomor handphone miliknya: 0811 488 172.

Sekalipun telah ada pertemuan dengan Danrem di Waris, indikasi teror masih saja terjadi terhadap Pastor John dimana pada hari Senin, 17 September 2007 jam 09.00 pagi, seorang tak dikenal masuk Wisma Pastor Diosesan "Condios" Abepura dengan cara melompati pagar belakang dan menanyakan keberadaan Pastor lalu tiba-tiba menghilang.

Pada hari yang sama, Ibu Veronika Dumatubun, anggota DPRD Kota Jayapura menyampaikan informasi yang baru diterimanya dari Pos KOTIS Kopassus Tribuana Kali Tami, PTP II Arso tgl. 16 September 2007 sekitar pk. 17.00 yang memberitakan bahwa Pastor John selama ini terlibat bisnis illegal kayu gaharu, kulit kayu masohi, coklat dan vanili.

Kondisi masyarakat Waris masih tetap tegang dan takut. Guna menyikapi hal ini, Pastor John mengambil langkah untuk melaporkan situasi itu kepada pihak-pihak yang berwenang. Langkah ini diambil setelah diamati tiadanya kemajuan di lapangan pasca laporan intimidasi ini disampaikan kepada Kapolda Papua pada 17 September 2007 dan kepada Majelis Rakyat Papua pada 18 September 2007. Isu-isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat Keerom dewasa ini, seperti, Pastor dikabarkan telah meninggal dunia dalam kecelakaan truck pengangkut batu untuk pembangunan pastoran di pinggir Kampung Banda pada 25 September 2007. Kecelakaan itu menyebabkan meninggalnya 2 warga Waris dan 14 lainnya menderita luka parah dan patah tulang, kini dirawat di RSUD Dok II Jayapura. Peristiwa ini berpotensi menimbulkan isu bahwa masyarakat hendak dilawankan dengan Pastor John Djonga karena dianggap dialah yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.

Situasi terakhir saat ini dirasa makin mencekam sehingga para guru SD YPPK Kenandega, Waris telah meninggalkan tempat tugas dan turun ke Jayapura. Karena anggota Kopassus sering mendatangi rumah mereka atau berkunjung ke sekolah dan mengajukan berbagai pertanyaan tentang Pastor John Djonga, Pr. Pada hari Rabu, 3 Oktober 2007 malam, pukul 20.00-23.00 waktu Papua, seorang anggota Kopassus bernama Luffi, datang ke rumah seorang guru dan

mengajak berceritera tuan rumah. Ia bertanya banyak ke istri sang guru tentang asal daerah Pastor John Djonga dan posisinya saat ini di mana. Melihat gelagat yang tidak baik ini, istri guru tadi menjawab balik bahwa mengapa mengajukan pertanyaan-pertanyaan demikian?

Mendengar jawaban demikian, Lutfi pamit pulang ke pos. Tidak berapa lama tuan rumah tiba-tiba terkejut karena handphone (HP) merk Nokia milik Lutfi tertinggal di atas tikar dimana tadinya ia duduk. HP tersebut dalam keadaan aktif tak bersignal. Karena ketidaktahuan mengenai teknologi HP, kejadian ini membuat penghuni seisi rumah panik dan menaruh curiga jangan-jangan HP sengaja ditinggalkan untuk merekam segala pembicaraan di rumah itu. Karena sudah larut malam, tidak ada yang berani membawa pergi ke pos Satgas. Pemilik rumah sengaja mematikan hp tersebut. Baru pada jam 02.00 waktu Papua, Lutfi ditemani seorang anggota Satgas TNI datang ke rumah guru tadi dengan maksud, mengambil hp-nya. Karena sesisi rumah telah tidur lelap, ketukan mereka di pintu tidak terdengar. Lalu anggota Satgas memanjat sotoh rumah dan menyenter ke dalam sambil memanggil nama sang guru. Dengan terkejut semuanya bangun dan Lutfi meminta kembali hp-nya. Nampak ia masih berdiam diri lama di bawah tangga rumah, tetapi dipaksa oleh anggota Satgas yang menemaninya agar pulang kembali ke pos. Tindakan ini membuat guru-guru dan keluarganya panik sehingga memilih turun ke Jayapura pada Kamis, 4 Oktober 2007.

Wilayah Distrik Arso

Keadaan Arso pasca pemukulan Kadistrik Arso Kota, masih tegang karena masyarakat tetap menuntut agar satuan Kopassus ditarik dari wilayah Keerom. Guna menyikapi hal ini, pada tgl. 23 Oktober 2007, Bupati mengundang Muspida dan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk PGGP Keerom, guna membahas masalah ini dan mencari jalan keluar bersama.

Pertemuan yang difasilitasi oleh Bupati Keerom ini mengundang unsur Muspida Keerom, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan. Dari pihak PGGP Keerom, hadir Pastor Wilem Sinawil, Pr (Ketua) dan Pendeta Eddy Togodly (Ketua GPPDI Keerom). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kapolres Persiapan Keerom yang diwakili oleh Wakapolres Keerom, Kapten Hotman Hutapea, Ketua DPRD Keerom, Kondrad Gusbager, Komandan Kopassus Tribuana Letkol Inf. Ishak Pangemanan, Komandan Kodim 1701, Letkol Kav. Napoleon, Perwira Penghubung dari Kodim 1707 dan sejumlah pejabat di wilayah Keerom.

Dalam pertemuan ini pihak PGGP Keerom secara jelas menyampaikan agar pihak TNI dan Kopassus segera mengubah kebijakan dan pendekatan militer di Papua, khususnya di wilayah Kabupaten Keerom dan wilayah perbatasan RI-PNG. Hal ini penting untuk menampilkan wibawa TNI di hadapan masyarakat, yang selama ini sudah hidup dalam trauma dan ketakutan sebagai akibat dari perlakuan dan tindakan aparat yang bertugas di daerah Keerom dan perbatasan. Pastor Willem menambahkan bahwa masyarakat Keerom memiliki ikatan budaya dan ikatan keluarga dengan warga di wilayah PNG sehingga setiap saat mereka pasti akan pergi ke wilayah tersebut. Maka pihak TNI yang bertugas di daerah perbatasan ini perlu memahami budaya masyarakat Keerom.

Pihak adat yang diwakili oleh bapak Bony Moenda mengatakan bahwa masyarakat Keerom adalah warga negara Indonesia sehingga sangat aneh ketika mereka diminta untuk mengikrarkan tetap setia kepada NKRI. Dengan demikian seharusnya TNI dan Kopassus memperlakukan masyarakat Keerom sebagai warga Negara Indonesia. Jangan ada intimidasi dan tuduhan kepada masyarakat sebagai OPM atau GPK. Justru masyarakat Keerom sejak dulu sudah menjadi korban dari OPM sehingga banyak yang mengungsi. Pihak masyarakat adat yang sudah cukup lama mengalami tindakan kekerasan dan perlakuan yang tidak baik dari pihak TNI dan Kopassus yang selalu membuat masyarakat merasa trauma, tidak aman dan ketakutan. Karena itu masyarakat meminta agar Kopassus ditarik semuanya dari wilayah Keerom dan wilayah perbatasan.

Kelompok perempuan menyampaikan bahwa kehadiran TNI dan pasukan khusus (Kopassus) hanya membuat keadaan yang tidak nyaman bagi perempuan dan keluarga mereka. Semua hidup dalam ketakutan. Karena itu pihak perempuan meminta agar TNI dan Kopassus tidak melakukan intimidasi dan kekerasan kepada masyarakat, khususnya terhadap kaum perempuan. Mereka juga meminta agar pihak pejabat pemerintah tidak menggunakan tenaga anggota kopassus sebagai pengawal maupun sopir karena hanya meresahkan masyarakat. Sikap pejabat ini hanya menunjukkan adanya ketakutan para pejabat Keerom terhadap masyarakat Keerom.

Dalam pertemuan ini Komandan Kopassus memberikan permintaan maaf kepada korban, Bpk. Charles Tafor, dan mengatakan bahwa anggota Kopassus yang melakukan pemukulan tersebut yakni Sertu Dedy telah diproses dan akan dikenakan sanksi tegas bahkan terancam akan dipecat karena tidak dapat menunjukkan sikap prajurit khususnya sikap anggota Kopassus yang benar.

Pada kesempatan tersebut juga Dandim 1701 menyatakan pentingnya prajurit TNI yang bertugas di daerah perbatasan, secara khusus di wilayah Keerom, untuk belajar dan dibekali dengan pengetahuan adat istiadat serta budaya orang Keerom. Selama ini memang pihaknya sudah mendatangkan tenaga antropolog dari Uncen untuk memberikan pengetahuan budaya Papua secara umum, tetapi menurutnya penting untuk secara khusus mendalami budaya masyarakat Keerom.

Kapolres Polres Persiapan Keerom yang diwakili Wakapolres menyatakan pihaknya bertanggungjawab terhadap kondisi kamtibmas di wilayah Keerom. Untuk itu pihaknya meminta kerjasama dari masyarakat Keerom untuk tidak terprovokasi dan emosi menghadapi situasi seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.

Charles Tafor selaku korban juga menyampaikan bahwa dirinya sudah memaafkan pelaku dan menyesalkan sikap pelaku tersebut. Selaku Kepala Distrik Arso, dirinya juga menghimbau masyarakat untuk tidak lagi terpancing emosi terhadap peristiwa yang dialaminya.

Menanggapi pernyataan-pernyataan tersebut, Bupati Keerom menegaskan bahwa masalah yang ada sekarang cukup difokuskan saja kepada kasus pemukulan Kepala Distrik Arso oleh oknum anggota Kopassus. Apalagi dalam pertemuan sebelumnya di Polres Persiapan Keerom, Sdr. Charles Tafor selaku korban sudah memaafkan si pelaku. Sementara itu ketua DPRD Keerom menegaskan bahwa pemerintah dan militer tidak bisa dipisahkan. Dimana ada pemerintah, harus ada militer sehingga keinginan masyarakat yang meminta agar Kopassus ditarik adalah hal yang tidak mungkin.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam laporan ini, kiranya dapat diambil sejumlah kesimpulan berikut ini:

1. Setelah mengalami sejarah kekerasan dan pengungsian yang panjang, masyarakat Keerom, khususnya di Distrik Arso, Waris, dan Web, berkeinginan hidup secara normal sebagaimana umumnya dijalani masyarakat biasa di wilayah lain. Merekapun berkehendak kuat untuk terlibat dalam pembangunan wilayah itu setelah dimekarkan menjadi satu

kabupaten sendiri. Hal ini terbukti dari kerja keras mereka menanam beratus hektar tanaman coklat maupun vanili yang kini sudah mulai berbunga di kampung-kampung mereka. Bahkan dalam rangka menciptakan taraf hidup yang lebih baik, dengan rela mereka kadang memikul hasil perkebunannya sehari-hari di jalan untuk dijual di Jayapura.

2. Keinginan itu dihambat oleh kehadiran pos-pos pasukan TNI di tengah kampung dalam jumlah yang signifikan di wilayah mereka yang nyata-nyata membangkitkan kembali rasa trauma dan tertekan. Mereka merasa tidak aman hidup di atas tanahnya sendiri sehingga ada beberapa anggota keluarga yang sudah mengemukakan keinginan mereka untuk mengungsi kembali ke PNG bila situasi keamanan masih sama seperti sekarang. Kehadiran pos TNI dengan dampak semacam ini nyata-nyata telah bertentangan dengan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pasal 9 ayat 2, pasal 29 ayat 1 dan pasal 30.
3. Kehadiran dan tindakan intimidasi anggota TNI, khususnya Satuan Kopassus tersebut, juga telah mengakibatkan pembatasan kebebasan bergerak pada warga masyarakat Waris. Tindakan ini bertentangan dengan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pasal 27.
4. Oknum-oknum Satuan TNI, khususnya Satuan Kopassus, senyatanya telah melakukan tindakan yang interogasi, penangkapan, dan penahanan yang hanya merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
5. Secara khusus saat ini warga Keerom benar-benar merasa resah dengan kehadiran dan tindak-tanduk satuan Kopassus di pos-Pos Satgas TNI yang mencurigai setiap gerak-gerik masyarakat, merekrut TBO, mengedarkan miras, melakukan praktik asusila, kekerasan terhadap perempuan sehingga masyarakat tidak dapat 'hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia' seperti diatur dalam pasal 35 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Satgas Kopassus senyatanya juga mengintimidasi, meneror Petugas Gereja Katolik yang menjalankan tugas pelayanan gereja di wilayah tersebut dan bahkan secara verbal menyatakannya ke media massa. Tindakan ini merupakan bukti nyata upaya merongrong kewibawaan suatu lembaga keagamaan yang dilindungi keberadaannya di negara ini dan memiliki andil

besar dalam pembangunan manusia di Papua. Selain itu tindakan tersebut dapat dinilai sebagai penyerangan terhadap pekerja kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia tahun 1998⁹.

7. Tingkah laku oknum-oknum anggota TNI, khususnya Satuan Kopassus, di Keerom yang melakukan intimidasi, interogasi, dan bahkan penganiayaan terhadap aparat pemerintah daerah (Kepala Kampung, Kepala Distrik) dan anggota kepolisian setempat sesungguhnya telah menodai jatidiri dan kewibawaan TNI sebagai Tentara Profesional yang menganut prinsip supremasi sipil dan menjunjung tinggi ketentuan hukum nasional.
8. Dari rangkaian laporan Keuskupan Jayapura kepada pimpinan militer di Jayapura sejak 2000, tidak terdapat perubahan nyata di lapangan mengenai perilaku prajurit dan komandan lapangan. Tindakan oknum-oknum tersebut sebagaimana dilaporkan di atas nyata-nyata menyalahi jatidiri TNI sebagai tentara profesional yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia¹⁰.
9. Selain itu, satuan-satuan TNI yang bertugas di Wilayah Keerom khususnya dan perbatasan pada umumnya tidak mampu menjalankan tugas sebagai pelindung keselamatan bangsa (pasal 7 ayat 1 UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia¹¹) karena justru berbagai tindak intimidasi, teror, perilaku asusila, datang dari oknum-oknum yang ditugaskan di wilayah tersebut terhadap warganegara Indonesia yang tinggal di wilayah Keerom.

⁹ Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional.

¹⁰ Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

¹¹ Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

V. Rekomendasi

Sebagai penutup laporan, kami merekomendasikan unsur-unsur berikut kepada pihak-pihak yang berwenang untuk secara menyeluruh mengatasi masalah yang telah dipaparkan di atas.

10. Mengingat keadaan traumatis ini telah berlangsung selama lebih kurang 20 tahun terakhir, tidaklah cukup Panglima TNI mengganti dan menindak tegas oknum-oknum TNI, khususnya Satuan Kopassus, yang meresahkan masyarakat. Diperlukan **pembaruan kebijakan pertahanan** yang lebih menyeluruh yang selaras dengan Undang-Undang No. 3/2002 tentang **Pertahanan Negara** dan Undang-Undang No. 34/2004 tentang **Tentara Nasional Indonesia**.
11. Sehubungan dengan pembaruan kebijakan tersebut, pos-pos militer harus ditempatkan di luar pemukiman penduduk guna menghindari segala tindakan eksesif dari pihak anggota-anggota TNI kepada masyarakat setempat seperti yang telah terjadi selama ini.
12. Dalam rangka pembaruan kebijakan pertahanan, anggota-anggota TNI yang hendak ditugaskan di Keerom khususnya dan Papua umumnya perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang adat istiadat dan filsafat hidup orang Papua.
13. Karena itu sebelum kebijakan baru dirumuskan, penempatan Satuan Kopassus di Wilayah Kabupaten Keerom **perlu segera ditanggihkan**.
14. Namun demikian, dalam **jangka pendek** Panglima TNI perlu segera mengganti dan menindak tegas oknum-oknum TNI yang melakukan berbagai tindak intimidasi dan teror yang meresahkan masyarakat agar kepercayaan masyarakat dan kewibawaan TNI dipulihkan kembali.
15. Panglima TNI perlu segera memberikan jaminan keamanan kepada semua petugas pemerintah dan petugas Gereja di wilayah Keerom sehingga tidak mengalami tindakan intimidasi dan teror dari oknum-oknum TNI.
16. Panglima TNI perlu segera memberikan jaminan keamanan kepada seluruh warga masyarakat dan **khususnya kaum perempuan, para guru dan**

semua orang yang namanya disebut dalam laporan ini agar dapat kembali hidup normal dan bertugas di wilayah tersebut.

17. Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dan Provinsi Papua segera melakukan upaya-upaya rehabilitasi keadaan dan perlindungan hak asasi masyarakat di Distrik Waris dan distrik lainnya di sekitar perbatasan RI-PNG.
18. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan segera mengirimkan tim penyelidik guna mengungkapkan secara lebih teliti dan mendalam keadaan hak asasi manusia di wilayah tersebut.

Demikianlah laporan ini disusun untuk disampaikan kepada instansi-instansi yang berwenang untuk memulihkan situasi hidup masyarakat Keerom dan masyarakat Papua pada umumnya.
